

***THE ROLE OF CITIZENSHIP EDUCATION ON STRENGTHENING
NATIONAL ANTHEM OF COMMITMENT TO THE COMMUNITY
CHINESE ETHNIC PONTIANAK***

**PERANAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM
PENGUATAN KOMITMEN KEBANGSAAN PADA MASYARAKAT
ETNIS TIONGHOA PONTIANAK**

Dada Suhaida

Dosen Program Studi PPKn STKIP-PGRI Pontianak

E-mail: civic.link@yahoo.com

ABSTRACT

One of the problems facing the country today is the commitment of the ebb tide of Chinese ethnic nationality in the community. Through citizenship education is central topic of education has strategic role in strengthening the commitment of anthem for nationality being one of a sense of nationality with replanting efforts to uphold the values of Pancasila and the 1945 constitution, love of country, and Bihineka Tunggal Ika, as spirit delivery and eventually developing national anthem of the spirit of nationality and patriotism in the running of social life, socially, and the country. But for shows this phenomenon of ethnic chinese national anthem of having no commitments to the nation and the state of Indonesia.

Keywords: education citizenship, nationalism, the commitment of nationalities, Chinese ethnic

ABSTRAK

Salah satu permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini adalah pasang surutnya komitmen kebangsaan di kalangan masyarakat etnis Tionghoa. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan merupakan topik sentral yang memiliki peran strategis dalam pendidikan kebangsaan untuk memperkokoh komitmen kebangsaan menjadi salah satu upaya penanaman kembali rasa kebangsaan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 , cinta tanah air , dan Bhineka Tunggal Ika, sebagai ruh kebangsaan yang akhirnya berkembang dan melahirkan semangat kebangsaan dan patriotisme dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, secara sosial, dan negara. Namun selama ini fenomena menunjukkan etnis Tionghoa tidak memiliki komitmen kebangsaan terhadap bangsa dan negara Indonesia.

Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Nasionalisme, Komitmen Kebangsaan, Etnis Tionghoa

Pasang surutnya komitmen kebangsaan (nasionalisme) merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia era kini. Ketika orde baru runtuh dan mewariskan konflik komunalisme masyarakat berdasarkan etnis yang menyebabkan rasa sebagai orang Indonesia semakin berkurang, diskriminasi ditengarai sebagai salah satu penyebab konflik tersebut.

Sehubungan dengan komitmen kebangsaan itu sendiri, bisa muncul secara

berbeda-beda dari orang per-orang dengan komitmen kejuangannya masing-masing. Akan tetapi, komitmen kebangsaan bisa juga muncul dalam kelompok yang berpotensi luar biasa kekuatannya. Komitmen kebangsaan memiliki konsep yang dinamis adanya dalam mencapai cita-cita bangsa yang selanjutnya berkembang menjadi wawasan kebangsaan yakni, pikiran-pikiran yang bersifat nasional dimana suatu bangsa memiliki cita-cita

kehidupan bersama dan tujuan nasional yang jelas.

Demikian dalam kedinamisannya, antarpandangan kebangsaan dari suatu bangsa dengan bangsa lainnya saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Dengan benturan budaya dan kemudian bermetamorfosa dalam campuran budaya dan sintesanya, maka derajat kebangsaan suatu bangsa menjadi dinamis dan tumbuh kuat dan kemudian terkristalisasi dalam paham kebangsaan (Kartasmita, 1994). Yang selanjutnya paham kebangsaan berkembang dari waktu ke waktu, dan berbeda dalam satu lingkungan masyarakat dengan lingkungan lainnya.

Sebagaimana Anderson (1991) menyatakan, dengan kedinamisannya jelas bahwa rasa kebangsaan yang telah membangun paham kebangsaan pada sekelompok masyarakat yang dilandasi semangat kebangsaan pada akhirnya akan melahirkan wawasan kebangsaan yang merupakan jiwa, cita-cita, atau falsafah hidup yang tidak lahir dengan sendirinya. Ia sesungguhnya merupakan hasil dari realitas sosial dan politik.

Dapat diartikan, rasa kebangsaan yang lahir dari realitas sosial dan politik akan melahirkan komitmen kebangsaan (nasionalisme) merupakan satu bentuk ideologi. Sebagai bentuk ideologi, komitmen kebangsaan berperan menciptakan kesadaran rakyat sebagai suatu bangsa serta menjadi acuan bersikap dan bertindak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sehubungan dengan itu, etnis Tionghoa dianggap tidak memiliki komitmen kebangsaan terhadap Republik Indonesia. Mereka dianggap lebih suka tinggal di luar negeri, tidak memiliki rasa ingin membangun Indonesia, dan dengan mudahnya pergi ke negara lain jika negara sedang susah, dan masih banyak lagi stereotip negatif yang berkembang di masyarakat Indonesia. Bahwa stereotip itu kuat melekat pada etnis Tionghoa, dan dampaknya menciptakan jarak antara etnis Tionghoa dengan etnis lainnya. Menurut Prasetyo dalam Suroso (2008), sebelum orde baru sejarah Indonesia diukir bersama pemuda dari berbagai etnis di Indonesia. Contoh nyata

adalah, ketika perang melawan penjajah Belanda, ketika Sumpah Pemuda dicetuskan, saat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk, hingga jabatan kementerian kabinet-kabinet awal Republik Indonesia berdiri, orang Tionghoa terlibat aktif, tanpa pernah berfikir bahwa mereka bukan orang Indonesia asli.

Ditambah dengan beberapa kebijakan pemerintah di masa orde baru yang tidak memihak etnis Tionghoa. Menurut Susetyo (2002) beberapa kebijakan penguasa membuat kedudukan etnis Tionghoa selalu merasa tersudut, baik di era Kolonial maupun di era Kemerdekaan. Contohnya, kebijakan pelarangan kebudayaan-kebudayaan Tionghoa, dan penghapusan sekolah-sekolah Tionghoa. Demikian juga Suryadinata (2005) menyatakan kebijakan pemerintah Indonesia yang ditandai dengan penghapusan pilar-pilar kebudayaan Tionghoa (termasuk penutupan sekolah Tionghoa, pembubaran organisasi etnik Tionghoa dan pemberedelan mass media Tionghoa) serta simbol-simbol dan adat-istiadat etnis Tionghoa. Dalam kondisi yang demikian sejumlah orang Tionghoa merasa tidak sebagai Tionghoa lagi.

Demikian pula dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tercatat dua peristiwa besar yang dirasakan sebagai terpaan yang menyakitkan bagi orang Tionghoa. Yaitu, peristiwa G30S PKI di tahun 1965 dan kerusuhan Mei 1998. Menurut Lan (1998) peristiwa di tahun 1965 merupakan trauma paling berat bagi orang Tionghoa di Indonesia. menurut Bachrun dan Hartanto (2000) berdasarkan penelitian yang dilakukan era pasca kerusuhan Mei 1998, mereka menyimpulkan telah terjadi krisis identitas di kalangan orang Tionghoa, karena segala upaya yang telah dilakukan agar bisa diterima sepenuhnya sebagai orang Indonesia telah hancur dalam waktu yang singkat akibat kerusuhan tersebut. Terkait dengan hal itu, Suryadinata (1999) memandang bahwa masalah identitas merupakan bagian penting dalam pemecahan 'masalah Cina' di Indonesia. Begitu pula dalam pandangan Lan (1998) bahwa pencarian jati diri orang Cina (Tionghoa) di Indonesia dihadapkan pada

beberapa pilihan, menjadi Indonesia atau tetap menjadi Cina atau mengadopsi identitas lain.

Terkait dengan fenomena itu, Pendidikan Kewarganegaraan dapat menjadi elemen yang kuat dalam kurikulum Indonesia untuk menanamkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Dengan Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika sebagai dasar dan ideologi negara yang merupakan hasil dari kesepakatan bapak pendiri bangsa, dan sampai sekarang negara Indonesia tetap berpegang teguh kepada Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila harus menjadi acuan negara dalam menghadapi berbagai tantangan global dunia.

PKn juga mempunyai peran penting dan strategis dalam penanaman nilai, karena koridornya yang *value based*. Nilai tersebut harus diajarkan dalam pendidikan formal maupun non-formal. Di era globalisasi ini, peran Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting untuk tetap menjaga eksistensi keberibadian bangsa Indonesia sebagai bentuk dari komitmen kebangsaan terhadap NKRI. Hal ini dapat memberikan dampak positif bagi bangsa Indonesia, tentunya dapat memperkokoh hubungan antara warganegara dengan negara.

Sehubungan dengan hal tersebut, etnis Tionghoa sebagai bagian dari bangsa Indonesia diharapkan memiliki komitmen kebangsaan dengan tetap bertahan pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, meskipun masih ada beberapa stereotip negatif yang melekat pada diri orang Tionghoa. Dengan pemaknaan pengalaman belajar PKn di sekolah dan masyarakat diharapkan masyarakat etnis Tionghoa bisa menjadi warganegara yang benar-benar cinta pada tanah air Indonesia apapun kondisinya.

Demikian adanya dapat dikatakan bahwa, konsep nasionalisme di Indonesia bersifat Nasionalisme-Kebangsaan. Nasionalisme adalah sebuah tuntutan politik, setiap bangsa berhak menuntut kedaulatan atas negeri tempatnya tinggal selama berabad-abad berdasarkan alasan budaya, ekonomi, dan kemasyarakatan. Sebagai dasar tujuan utama berdirinya negara Republik Indonesia, asas nasionalisme tercantum dalam Pancasila

sebagai sila ke tiga, yaitu “persatuan” sebagai dasar ideologi negara Pancasila sepatutnya menjadi acuan kerangka kita dalam membangun kehidupan berbangsa. Sebab selain dipandang sebagai dasar ideologi negara, Pancasila telah ditetapkan sebagai sumber hukum oleh MPR dan juga senantiasa dipandang sebagai paradigma budaya dalam melaksanakan semboyan negara “Bhinneka Tunggal Ika”.

Sedangkan konsep nasionalisme menurut Anderson (1996: 6) dalam Wardaya, Baskara (2002: 16) mendefinisikan *nation* (bangsa) sebagai “suatu komunitas politis yang dibayangkan-dan dibayangkan sekaligus sebagai sesuatu yang secara inheren terbatas dan berdaulat” (*an imagined political community and imagined as both inherently limited and sovereign*). Istilah dibayangkan (*imagined*) ini penting, menurut Anderson, mengingat bahwa anggota-anggota dari *nasion* itu kebanyakan belum pernah bertemu satu sama lain, tetapi pada saat yang sama di benak mereka hidup suatu bayangan bahwa mereka berada dalam suatu kesatuan komunitas tertentu. Karena hidup dalam bayangan (dalam arti positif) manusia yang juga hidup dan berdinamika. Artinya, nasionalisme di sini dimengerti sebagai sesuatu yang hidup, yang terus secara dinamis mengalami proses pasang surut, naik turun. Pandangan yang demikian ini mengandaikan bahwa nasionalisme merupakan sesuatu yang hidup, yang secara dinamis berkembang serta mencari bentuk-bentuk baru sesuai dengan perkembangan dan tuntutan jaman.

Isjwara (1989: 130) menyebutkan empat macam cita-cita nasionalisme, yaitu:

1. Perjuangan untuk mewujudkan persatuan nasional yang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, keagamaan, kebudayaan, dan persekutuan serta adanya solidaritas.
2. Perjuangan untuk mewujudkan kebebasan nasional yang meliputi kebebasan dari kekuatan-kekuatan intern yang tidak bersifat nasional atau yang hendak mengenyampingkan bangsa dan negara.

3. Perjuangan untuk mewujudkan kesendirian, perbedaan, individualitas, keaslian dan keistimewaan.
4. Perjuangan untuk mewujudkan perbedaan di antara bangsa-bangsa yang meliputi perjuangan untuk memperoleh kehormatan, kewibawaan, gengsi dan pengaruh.

Jadi secara umum, nasionalisme juga diartikan sebagai tuntutan politik yang menghendaki agar sebuah negara dibangun di wilayah tertentu, dengan kedaulatan penuh dan tidak diperbolehkan negara atau kekuasaan negara lain menduduki di wilayah tersebut. Dan di dalam wilayah negara tersebut telah tinggal kelompok-kelompok komunitas yang secara turun temurun menjadi penduduk tetap negeri tersebut. Di sana penduduk tetap itu secara turun temurun dalam kurun sejarah lama membangun kebudayaan. Seperti yakni, mengembangkan aliran-aliran pemikiran sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan tertentu, mengembangkan agama dan aliran-aliran agama yang mereka yakini benar, membentuk pola hidup dan adat istiadat dalam aneka ragam sesuai dengan tuntutan budaya, melahirkan kearifan-kearifan dan ragam seni, sastra, ilmu pengetahuan, filsafat, bentuk-bentuk organisasi sosial dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu berdiri di atas fondasi yang disebut sebagai gambaran dunia (*worldview*), pandangan hidup (*way of life*), dan sistem nilai (etika dan estetika) tertentu.

Sedangkan pengertian yang diberikan Kartodirdjo (2003) mengenai nasionalisme, adalah didasarkan pada perkembangan sejarah bangsa Indonesia dan realitas sosial budayanya, serta berdasarkan berbagai pernyataan politik pemimpin Indonesia sebelum era kemerdekaan, seperti manifestasi Perhimpunan Indonesia dan Sumpah Pemuda 1928. Dan unsur-unsur nasionalisme Indonesia mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Kesatuan (*unity*) mentransformasikan hal-hal yang Bhineka menjadi seragam sebagai konsekuensi dari proses integrasi. Tetapi persatuan dan kesatuan tidak boleh

disamakan dengan penyeragaman dan keseragaman.

2. Kebebasan (*liberty*) yang merupakan keniscayaan bagi negeri-negeri yang terjajah agar bebas dari dominasi asing secara politik dan eksploitasi ekonomi serta terbebas pula dari kebijakan yang mengakibatkan hancurnya kebudayaan yang berkeperibadian.
3. Kesamaan (*equality*) yang merupakan bagian implisit dari masyarakat demokratis dan merupakan sesuatu yang berlawanan dengan politik kolonial yang diskriminatif dan otoriter.
4. Keperibadian (*identity*) yang hilang disebabkan ditiadakan dimarginalkan secara sistematis oleh pemerintah kolonial Belanda.
5. Pencapaian-pencapaian dalam sejarah yang memberikan inspirasi dan kebanggaan bagi suatu bangsa sehingga bangkit semangatnya untuk berjuang menegakkan kembali harga diri dan martabatnya di tengah bangsa.

Jika diamati dari unsur-unsur yang menjadi konsep tersebut di atas, didasarkan atas pengamatannya terhadap sejarah Indonesia, khususnya sejak masa penjajahan bahwa Kartodirdjo jelas sekali menerima beberapa pandangan yang kemukakan oleh Renan dalam Khon (1965) bahwa:

Nation a soul, spiritual principle. Two things, which are really only one, go to make up this soul or spiritual principle. One of the things lies in the past, the other in the present. The one is the possession common of rich heritage of memories; and the other is actual agreement, the desire to live together, and will to continue to make the most of the joint inheritance.

Pemikiran Renan di atas, menegaskan bahwa untuk membentuk suatu *nation*, yang diutamakan adalah prinsip keinginan untuk hidup bersama. Dengan arti lain, segala warisan dan kejayaan serta penderitaan yang dialami bersama pada masa lalu merupakan modal dasar untuk membangun kebersamaan pada masa depan. Karena, sebuah *nation*

merupakan suatu kesatuan yang sangat kuat lantaran penderitaan di masa lalu.

Berdasarkan pandangan-pandangan tersebut, dominasi dan supremasi bukanlah hal yang merupakan kebenaran yang timbul dari alam kita. Ajaran agar manusia menguasai alam bukanlah hal yang benar, sedang yang benar adalah, bahwa manusia hidup bersama alam dalam keterikatan harmonis. Demikian pula dominasi oleh satu bagian umat manusia atas yang lain adalah bertentangan dengan kehendak alam. Sebab itu nasionalisme yang perlu kita kembangkan bukan nasionalisme yang berusaha mendominasi pihak lain. Nasionalisme yang kita perlukan adalah nasionalisme yang di satu pihak melawan supremasi dan dominasi, sedangkan di pihak lain adalah usaha untuk membawa keterikatan dan hubungan satu sama lain. Selama masih ada usaha untuk dominasi dan supremasi nasionalisme diperlukan untuk menjaga agar kehidupan umat manusia selaras satu sama lain dan dengan Alam Semesta. Karena Alam Semesta adalah milik dan buatan Tuhan Yang Maha Esa, maka di sini terletak unsur spiritual nasionalisme yang kita perlukan. Sebab dalam segala kehidupan yang bersifat relatif dan tidak pasti itu hanya ada satu yang bersifat absolut dan pasti, yaitu Tuhan Yang Maha Esa.

Maka nasionalisme Indonesia adalah Keterikatan dan Interelasi antara bagian-bagian bangsa Indonesia yang terjadi secara dinamis untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis dalam Alam Semesta dan menghasilkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin yang hakiki. Jika didalami lagi maka ini pula kehendak dari Dasar Negara yakni Pancasila.

Dengan mengacu kepada konsepnya, Nasionalisme memiliki peran sebagai sebuah identitas suatu bangsa, dimana identitas tersebut mempunyai peranan yang tertinggi, hal itu dikarenakan identitas menjadi suatu pembeda antara "siapa saya" dan "siapa mereka". Selain itu identitas mempunyai salah satu fungsi yaitu untuk memperlancar interaksi (Dugis, 2012).

Sebagaimana pengertian Nasionalisme di negara Eropa dan Asia memiliki konotasi

yang berbeda. Di negara Eropa Nasionalisme memiliki konotasi negatif dan identik dengan perang, sedangkan di negara Asia nasionalisme diindikasikan sebagai rasa cinta tanah air, loyalitas bangsa sebagai warganegara dan hal itu berkonotasi positif. Contohnya, di Indonesia memiliki konstruktif positif tentang nasionalisme, dimana nasionalisme adalah sebuah motif *self belonging* yaitu satu bangsa, bangsa Indonesia (Wardhani, 2012).

Dengan demikian Nasionalisme memiliki tiga peranan yaitu; nasionalisme sebagai identitas atau pembeda, nasionalisme sebagai ideologi, contohnya Nazi Jerman yang memberantas penduduk bukan asli Jerman atas dasar ideologinya, dan yang terakhir nasionalisme sebagai pergerakan contohnya titik awal pergerakan nasional Indonesia dengan adanya sumpah pemuda.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa nasionalisme merupakan sebuah identitas bangsa dimana identitas dikatakan sebagai suatu pembeda antara bangsa satu dengan bangsa lainnya. Selain itu Nasionalisme berperan penting dikarenakan mengingat peranan dari Nasionalisme itu sendiri menyangkut hal-hal yang bersifat fundamental meskipun hasil yang didapat dari adanya rasa nasionalisme tidak selalu berkonotasi positif tetapi juga berkonotasi negatif.

Melihat begitu pentingnya sebuah identitas suatu bangsa, sudah tentu setiap warganegara harus memiliki komitmen kebangsaan yang besar terhadap bangsa dan negaranya, tanpa terkecuali etnis Tionghoa Indonesia. Sebagaimana dengan makna yang terkandung di dalamnya, bahwa komitmen kebangsaan adalah janji yang dipatrikan pada diri sendiri, atau kepada bangsa dan negara yang diwujudkan dalam setiap tindakan seseorang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) komitmen adalah sebuah perjanjian (keterikatan) untuk melakukan sesuatu. Sedangkan dalam konteks pada penelitian ini, bahwa komitmen yang dimaksudkan disini adalah komitmen seseorang terhadap rasa kebangsaan (nasionalisme) terhadap bangsa dan negara. Maka, dengan memiliki komitmen

kebangsaan yang tangguh diharapkan sebuah bangsa akan tumbuh menjadi bangsa yang besar dan dihargai oleh bangsa lain apabila memiliki nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh seluruh warganegarannya. Dan bangsa yang memiliki komitmen kebangsaan yang tangguh akan mampu bertahan di tengah arus perubahan dunia dan mampu memberikan warna bagi kemajuan dunia manakala bangsa memiliki identitas yang kuat dan menjadi roh bagi bangsa tersebut dalam melestarikan eksistensinya.

Demikian halnya dengan bangsa Indonesia, sebagai bangsa yang besar dan memiliki banyak potensi untuk menjadi bangsa yang maju bahwa semua potensi dan kapasitas bangsa yang dimiliki oleh masyarakat dan bangsa Indonesia dapat menjadi peluang mengambil peran dalam peradaban bangsa. Cita-cita luhur ini akan terwujud jika saja segenap lapisan masyarakat memiliki tekad dan kesadaran bersama, saling menyatukan komitmen dan pandangan untuk memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa Indonesia. Semua anak bangsa tanpa terkecuali etnis Tionghoa harus merasa memiliki bangsa ini dan terpanggil untuk memberikan pengabdian terbaik melakukan berbagai macam upaya dalam menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa serta menyumbangkan sesuatu demi kemajuan daerah, bangsa dan negara.

Untuk itu, kita sebagai bangsa Indonesia sangat penting memegang teguh lima komitmen kebangsaan yang telah menjadi modal dasar yang kuat dari para pendidik bangsa dalam membangun Indonesia. Sebagaimana kelima komitmen itu adalah:

1. Pancasila, sebagai dasar falsafah dan kepribadian bangsa.
2. UUD 1945, sebagai sumber hukum dan moralitas bangsa.
3. Bhinneka Tunggal Ika, sebagai lambang persatuan bangsa.
4. Bendera Merah Putih, sebagai lambang kebanggaan bangsa.
5. NKRI, sebagai lambang kedaulatan bangsa Indonesia.

Kelima komitmen di atas tersebut, merupakan roh yang menjiwai seluruh warga

bangsa dalam membangun bangsa dan negara serta menjadi landasan dalam bersikap dan bertingkah laku dalam setiap kehidupan sehari-hari.

Terkait dengan hal itu, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran yang strategis dalam upaya mengembangkan nilai-nilai kebangsaan kepada seluruh warganegarannya. Sebagaimana dalam perkembangannya pelajaran *civic* mulai diperkenalkan pada tahun 1790 di Amerika Serikat, yaitu dalam rangka “meng-Amerikakan” bangsa Amerika atau dikenal dengan istilah “*theory of Americanization*”. Henry Randal Waite dalam penerbitan masalah “*The Citizen: dan Civics*” di tahun 1886 mengemukakan “*Civic*” dengan “*the Science of citizenship-the relation of man, the individual, to man in organized collection-the individual in his relation to the state*”. Dari pengertian tersebut, bahwa ilmu kewarganegaraan adalah ilmu yang membicarakan tentang hubungan manusia dengan manusia dalam perkumpulan-perkumpulan yang terorganisir (organisasi sosial, ekonomi, politik) individu-individu dan dengan negaranya. Sebagaimana Somantri (2001: 299) mendefinisikan.

Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat dan orang tua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih siswa berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Lebih jauh Somantri menjelaskan:

Pendidikan kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antar warganegara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga yang

dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

Penjelasan yang sama di atas juga dikemukakan oleh Depdiknas (2006: 49) yang mengemukakan definisi pendidikan kewarganegaraan:

PKn merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pelajaran yang tidak hanya menitikberatkan kepada aspek kognitif saja, PKn juga memiliki sasaran pada pengembangan kemampuan dan keterampilan berfikir aktif warganegaranya dalam mengamalkan nilai-nilai warga negara yang baik yang mampu melaksanakan hak serta kewajibannya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, agar menjadi warganegara yang bisa diandalkan oleh bangsa dan negara, dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya secara benar.

Untuk itu penelitian ini membahas mengenai "Peranan Pendidikan Kewarganegaraan dalam Penguatan Komitmen Kebangsaan pada Masyarakat Etnis Tionghoa Pontianak. Penelitian ini bertujuan mendapatkan gambaran mengenai makna pengalaman belajar PKn di sekolah dan masyarakat dalam penguatan komitmen kebangsaan di kalangan masyarakat etnis Tionghoa; dan memberikan gambaran mengenai komitmen kebangsaan etnis Tionghoa di lihat dari aspek wawasan kebangsaan, sikap kebangsaan dan perilaku kebangsaannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode fenomenologi dengan pendekatan kualitatif

atau naturalistik. Alasan metode dan teknik penelitian dipilih karena masalah yang dikaji menyangkut masalah yang sedang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara khususnya pada masyarakat etnis Tionghoa. Melalui pendekatan fenomenologi diharapkan deskripsi atas fenomena yang tampak di lapangan dapat diinterpretasikan makna dan isinya lebih dalam.

Lokasi penelitian di Kalimantan Barat, yaitu Kota Pontianak. Pertimbangan penetapan lokasi penelitian di Kota Pontianak yang ditentukan secara *purposive sampling*. Jenis data adalah data primer dan skunder. Subjek penelitian adalah etnis Tionghoa dari beberapa kalangan, yaitu: aktor politik, pengusaha, pedagang, dan mahasiswa. Sedangkan informan dari beberapa teman seperkumpulan subjek yang dapat memberikan informasi tentang permasalahan yang menjadi fokus penelitian, dan satu orang guru PKn. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Analisis data dilakukan dengan derajat kepercayaan (*credibility*) melalui teknik triangulasi sumber dan metode, perpanjangan kehadiran peneliti, pengecekan teman sejawat dan ketekunan pengamatan, derajat ketrampilan (*transferability*), derajat kebergantungan (*dependability*), dan derajat kepastian (*confirmability*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah dan Masyarakat bagi Etnis Tionghoa Pontianak

PKn memberikan kontribusi berupa pengetahuan dan pemahaman khususnya di kalangan etnis Tionghoa Pontianak. Khususnya mengenai tujuan dan fungsi PKn terhadap komitmen kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun pengetahuan pengajaran PKn yang diperoleh di sekolah oleh etnis Tionghoa sudah dilewati cukup lama, namun mereka masih bisa mengingat

dan memaknai pengalaman pengajaran PKn tersebut. Walaupun pengalaman PKn yang di sekolah sudah berlalu cukup lama, akan tetapi makna dan tujuan PKn untuk membentuk peserta didik agar memiliki identitas bangsa sebagai komitmen kebangsaan masih melekat dalam ingatan mereka.

Pengalaman pengajaran PKn di sekolah di tampilkan oleh etnis Tionghoa adalah, bahwa PKn di sekolah dimaknai mereka sebagai pengajaran yang menanamkan nilai-nilai karakter nasionalis (*civics nasionalism*), yakni bagaimana peserta didik diajak untuk bisa berfikir, bersikap dan penghayatan yang tinggi terhadap bangsa, lingkungan fisik, sosial bahkan politik bangsanya. Artinya, bagi etnis Tionghoa pengalaman PKn memberikan tujuan dan fungsi dalam upaya menanamkan pemahaman mengenai komitmen kebangsaan berupa penghayatan, kepedulian dan tanggungjawab atas semua masalah bangsa dan negara. Dengan menanamkan bagaimana memperlakukan dan menyikapi suka duka kolektif (nasional) sebagai keprihatinan pribadi (*individual*) sebagai sikap patriotisme.

Pengalaman PKn di sekolah bagi etnis Tionghoa juga sebagai sarana dalam membentuk dan melahirkan warga negara yang cerdas, terampil, memiliki rasa cinta tanah air dan bertindak tulus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Selanjutnya, etnis Tionghoa menyatakan bahwa PKn di sekolah memiliki peran dalam memberikan pandangan mengenai pentingnya memiliki pengetahuan mengenai pendidikan politik dan demokrasi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam pemantapan karakter bangsa dengan memiliki rasa persatuan dan kesatuan. Contohnya, warganegara memiliki pengetahuan tentang hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, warga negara memiliki jiwa patriot dan nasionalis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, selain itu warganegara memiliki rasa memiliki dan cinta terhadap tanah air Indonesia.

Pemaknaan nilai-nilai PKn di sekolah ternyata terus dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Terutama pada nilai-nilai kerja keras, kejujuran, kedisiplinan dalam

menjalankan usaha dagangnya. Dari penampilan etnis Tionghoa juga terungkap bahwa mereka memiliki etos kerja yang ulet. Selain etos kerja yang ulet, etnis Tionghoa juga memiliki prinsip hidup yang disiplin, yang berani membela tanah air kelahirannya dengan apresiasi membangun kesejahteraan daerah terpencil di Pontianak Kalbar.

Penampilan etnis Tionghoa juga tidak selalu tertutup atau eksklusif seperti stereotip yang selama ini berkembang. Dari penampilan partisipan tergambar bahwa mereka memiliki pribadi yang cukup terbuka dalam lingkungan sosial mereka. Hal tersebut dikarenakan, bahwasannya etnis Tionghoa menyadari hak dan kewajiban sebagai warga negara yang memiliki identitas bangsa Indonesia yang harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan di tanah kelahirannya.

Komitmen Kebangsaan Etnis Tionghoa di lihat dari Aspek Wawasan Kebangsaan, Sikap Kebangsaan, dan Prilaku Kebangsaan

Penampilan komitmen kebangsaan etnis Tionghoa tergolong kuat, sebagaimana terlihat dari penampilan wawasan, sikap dan perilaku kebangsaan mereka. Temuan penelitian menunjukkan bahwa komitmen kebangsaan etnis Tionghoa ditampilkan dengan memiliki wawasan kebangsaan yang baik, bahwa mereka memiliki pengetahuan mengenai sejarah daerah mengenai perjuangan rakyat Pontianak Kalbar melawan penjajah. Dengan pengetahuan tersebut mereka memaknai bahwa dirinya merupakan bagian dari bangsa Indonesia yang tidak terpisahkan dari sejarah perjuangan bangsa dalam mengusir penjajah dari bumi pertiwi.

Wawasan kebangsaan tersebut juga di tampilkan dalam bentuk pengetahuan mengenai perkembangan politik lokal di Pontianak Kalbar, pembangunan yang terus mengalami kemajuan. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata negara, etnis Tionghoa menyadari bahwa komitmen kebangsaan lahir dari rasa senasib dan kebersamaan untuk keinginan hidup bersama-sama menghadapi tantangan dan ancaman dari

dalam bahkan dari bangsa luar guna menyatukan tekad menjadi bangsa yang kuat, dihormati dan disegani oleh bangsa-bangsa lain.

Pengalaman pendidikan kewarganegaraan etnis Tionghoa juga ditampilkan dalam sikap kebangsaan mereka. Di mana pemaknaan PKn yang dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat mereka ditampilkan dengan sikap kemandirian dan dewasa, yang dicirikan dengan memiliki rasa cinta tanah air, rasa bangga menjadi orang Indonesia, berkeinginan menjaga kerukunan sesama warga, serta mereka juga memiliki cita-cita bersama membangun daerah Kota Pontianak. Sikap kemandirian dan kedewasaan tersebut juga ditandai dengan sikap berkeinginan mendukung kebijakan pemerintah yang dianggap sesuai untuk kepentingan masyarakat banyak, akan tetapi sikap menolak segala kebijakan pemerintah Kota Pontianak yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat banyak. Kedewasaan sikap etnis Tionghoa juga ditampilkan dalam komitmen mereka untuk ikut menyukseskan pilkada 2013, pemilu serta pilpers 2014 sebagai pemilih aktif.

Komitmen kebangsaan etnis Tionghoa ternyata diaplikasikan dalam perilaku yang positif. Perilaku kebangsaan ditampilkan dalam nilai-nilai ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan memiliki modal etos kerja yang gigih, jujur dalam melakukan usaha sehingga dapat dipercaya oleh orang lain. Sebagaimana Perilaku positif juga ditampilkan dengan aktif dalam bidang politik lokal maupun nasional. Etnis Tionghoa menyadari bahwa komitmen perilaku mereka di perkuat oleh Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia serta Undang-Undang No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan etnis yang telah membuka ruang bagi mereka dalam berbagai bidang, bukan saja dalam ekonomi namun bidang politik pun telah terbuka bebas tanpa ada lagi diskriminasi. Komitmen kebangsaan etnis Tionghoa juga ditampilkan dengan aksi mendukung kebijakan pemerintah Pontianak dalam

pembangunan yang berguna bagi masyarakat luas dan menolak jika tidak berpihak kepada masyarakat luas. Perilaku mendukung yakni: aktif dalam membayar pajak dan taat pada peraturan hukum yang berlaku, menolak kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat luas dengan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah terkait dalam hal ini DPRD Kota Pontianak.

Dari penampilan mengenai komitmen kebangsaan etnis Tionghoa yang di lihat dari ke tiga aspek tersebut, bahwa etnis Tionghoa juga memiliki komitmen yang kuat terhadap bangsa Indonesia. Dikarenakan mereka merasa menjadi bagian penting dalam sejarah bangsa Indonesia yang kelam sehingga melahirkan jiwa patriot untuk aktif dalam bidang politik dengan cita-cita membangun daerah Pontianak Kalbar lebih baik dan lebih maju.

Pembahasan

Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah dan Masyarakat bagi Etnis Tionghoa Pontianak

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi terungkap bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memberikan kontribusi yang besar terhadap etnis Tionghoa. Hal tersebut ditampilkan oleh etnis Tionghoa yang mengemukakan bahwa PKn di sekolah dan di masyarakat memberikan pengalaman tentang pentingnya pemahaman dan kesadaran mengenai hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia (hakikat NKRI), dengan prinsip tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika sebagai ruh kebangsaan yang akhirnya menguatkan komitmen kebangsaan dengan melahirkan semangat kebangsaan dan jiwa patriotisme dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sebagaimana dalam proyek PKn dan BP Depdiknas (2000: 21) menyebutkan fungsi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai berikut:

- a. Mengembangkan dan melestarikan nilai dan moral Pancasila secara dinamis dan terbuka. Dinamis dan terbuka dalam arti nilai dan moral yang dikembangkan

mampu menjawab tantangan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, tanpa kehilangan jatidiri sebagai bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat.

- b. Mengembangkan dan membina manusia Indonesia seutuhnya yang sadar politik dan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia dilandaskan pada Pancasila dan UUD NRI 1945.
- c. Membina pemahaman dan kesadaran terhadap hubungan antar warganegara dan negara, antar warganegara dengan sesama warganegara, dan pendidikan pendahuluan bela negara agar mengetahui serta mampu melaksanakan dengan baik dan kewajiban sebagai warganegara.

Selanjutnya di dalam kurikulum 2004, mata pelajaran kewarganegaraan berfungsi “sebagai wahana untuk membentuk warganegara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksi dirinya dalam kebiasaan berfikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD NRI 1945”.

Berdasarkan fungsinya mata pelajaran PKn seperti yang diuraikan di atas, dapat dilihat bahwa PKn mempunyai fungsi yang sangat penting dan strategis, karena menyangkut aspek afektif dalam rangka melanggengkan kehidupan bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 45. Oleh sebab itu, dalam proses pembelajaran PKn harus sesuai dengan karakter PKn itu sendiri. Dapat disimpulkan, mata pelajaran PKn juga mempunyai fungsi untuk membentuk warganegara yang mampu berfikir sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD NRI 45.

Bagi etnis Tionghoa pengalaman pembelajaran PKn di sekolah terus dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam lingkungan kerja, usaha dan bergaul dengan teman seperkumpulan. Oleh karena, etnis Tionghoa menyadari jatidirinya sebagai bagian

warganegara Indonesia yang memiliki komitmen kebangsaan (nasionalisme) dengan menjadi individu yang cendikia dan penyuluh bagi masyarakat etnis Tionghoa sendiri bahkan bagi masyarakat non-Tionghoa.

Sebagai warganegara yang memiliki komitmen kebangsaan etnis Tionghoa menyadari bahwa partisipasi aktif mereka dalam bidang ekonomi maupun politik merupakan wujud dari komitmen mereka terhadap bangsa. Bagaimanapun tidak dapat dipungkiri, bahwa etnis Tionghoa merupakan bagian dari sejarah panjang bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari tangan para penjajah.

Penampilan komitmen kebangsaan etnis Tionghoa tersebut di atas, selaras dengan konsep yang diberikan Kartodirdjo (2003) mengenai nasionalisme, adalah didasarkan pada perkembangan sejarah bangsa Indonesia dan realitas sosial budayanya. Sedangkan pengertian yang diberikan Kartodirdjo (2003) mengenai nasionalisme didasarkan pada perkembangan sejarah bangsa Indonesia dan realitas sosial budayanya, serta berdasarkan berbagai pernyataan politik pemimpin Indonesia sebelum era kemerdekaan, seperti manifestasi Perhimpunan Indonesia dan Sumpah Pemuda 1928. Dan unsur-unsur nasionalisme Indonesia mencakup hal-hal seperti berikut:

1. Kesatuan (*unity*) mentransformasikan hal-hal yang Bhineka menjadi seragam sebagai konsekwensi dari proses integrasi. Tetapi persatuan dan kesatuan tidak boleh disamakan dengan penyeragaman dan keseragaman.
2. Kebebasan (*liberty*) yang merupakan keniscayaan bagi negeri-negeri yang terjajah agar bebas dari dominasi asing secara politik dan ekspoitasi ekonomi serta terbebas pula dari kebijakan yang mengakibatkan hancurnya kebudayaan yang berkepribadian.
3. Kesamaan (*equality*) yang merupakan bagian implisit dari masyarakat demokratis dan merupakan sesuatu yang

berlawanan dengan politik kolonial yang diskriminatif dan otoriter.

4. Kepribadian (*identity*) yang hilang disebabkan ditiadakan dimarginalkan secara sistematis oleh pemerintah kolonial Belanda.
5. Pencapaian-pencapaian dalam sejarah yang memberikan inspirasi dan kebanggaan bagi suatu bangsa sehingga bangkit semangatnya untuk berjuang menegakkan kembali harga diri dan martabatnya di tengah bangsa.

Jika diamati dari unsur-unsur yang menjadi konsep tersebut, didasarkan atas pengamatannya terhadap sejarah Indonesia, khususnya sejak masa penjajahan. Bahwa Kartodirdjo jelas sekali menerima beberapa pandangan yang kemukakan oleh Renan dalam Khon (1965) bahwa:

Nation a soul, spiritual principle. Two things, which are really only one, go to make up this soul or spiritual principle. One of the things lies in the past, the other in the present. The one is the possession common of rich heritage of memories; and the other is actual agreement, the desire to live together, and will to continue to make the most of the joint inheritance.

Pemikiran Renan di atas menegaskan bahwa untuk membentuk suatu *nation*, yang diutamakan adalah prinsip keinginan untuk hidup bersama. Dengan arti lain, segala warisan dan kejayaan serta penderitaan yang dialami bersama pada masa lalu merupakan modal dasar untuk membangun kebersamaan pada masa depan. Karena, sebuah *nation* merupakan suatu kesatuan yang sangat kuat lantaran penderitaan di masa lalu.

Berdasarkan pandangan-pandangan di atas tersebut dominasi dan supremasi bukanlah hal yang merupakan kebenaran yang timbul dari alam kita. Ajaran agar manusia menguasai alam bukan hal yang benar, sedang yang benar adalah bahwa Manusia hidup bersama alam dalam keterikatan harmonis. Demikian pula dominasi oleh satu bagian umat manusia atas

yang lain adalah bertentangan dengan kehendak alam. Sebab itu nasionalisme yang kita perlu kembangkan bukan pula nasionalisme yang berusaha mendominasi pihak lain. Nasionalisme yang kita perlukan adalah nasionalisme yang di satu pihak melawan supremasi dan dominasi, sedangkan di pihak lain adalah usaha untuk membawa keterikatan dan hubungan satu sama lain. Selama masih ada usaha untuk dominasi dan supremasi, nasionalisme diperlukan untuk menjaga agar kehidupan umat manusia selaras satu sama lain dan dengan Alam Semesta. Karena Alam Semesta adalah milik dan buatan Tuhan Yang Maha Esa, maka di sini terletak unsur spiritual nasionalisme yang kita perlukan. Sebab dalam segala kehidupan yang bersifat relatif dan tidak pasti itu hanya ada satu yang bersifat absolut dan pasti, yaitu Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang strategis dalam mengupayakan penanaman bahkan penguatan komitmen kebangsaan melalui pendidikan yang berlangsung di sekolah maupun di luar sekolah untuk lebih memahami hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia (hakikat NKRI) dengan prinsip tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika sebagai ruh kebangsaan yang akhirnya akan menguatkan komitmen kebangsaan dengan melahirkan semangat kebangsaan dan jiwa patriotisme dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Komitmen Kebangsaan Etnis Tionghoa di lihat dari Aspek Wawasan Kebangsaan, Sikap Kebangsaan, dan Perilaku Kebangsaan

Komitmen kebangsaan di kalangan etnis Tionghoa Pontianak cukup baik, terutama etnis Tionghoa memiliki pengetahuan dan kesadaran mengenai nilai-nilai Pancasila, cinta tanah air, Bhineka Tunggal Ika, maupun politik demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen kebangsaan mereka tercermin melalui wawasan kebangsaan. Dengan wawasan kebangsaan yang baik telah memberikan penguatan

komitmen kebangsaan bagi peribadi di kalangan etnis Tionghoa, sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

Penampilan wawasan kebangsaan etnis Tionghoa di atas, sejalan dengan tujuan Pendidikan Undang-Undang Ri No. 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional yang telah memberikan dampak yang besar dari reformasi pendidikan nasional itu sendiri. Seperti yang tertuang secara imperatif menggariskan bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Mengacu pada uraian di atas, jelas kiranya bahwa sistem pendidikan nasional menguatkan konsep tujuan pendidikan kewarganegaraan yang dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air (penjelasan Pasal 37 ayat 1). Dalam konteks tersebut, pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya merupakan pendidikan mengenai wawasan kebangsaan atau kerakater bangsa.

Untuk itu, wawasan kebangsaan sangat penting dimiliki oleh setiap warganegara, karena dengan wawasan kebangsaan suatu bangsa dapat menentukan cara pandangnya yang mendayagunakan kondisi geografis negara, sejarah, sosio-budaya, ekonomi dan politik serta pertahanan keamanan demi mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasional. Wawasan kebangsaan menentukan cara bangsa menempatkan diri dalam tata hubungan dengan sesama bangsa dan dalam pergaulan dengan bangsa lainnya. Adapun, nilai-nilai wawasan kebangsaan, yaitu penghargaan terhadap harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa,

tekad bersama untuk berkehidupan yang bebas, merdeka, dan bersatu, cinta tanah air dan bangsa, demokrasi dan kedaulatan rakyat, kesetiakawanan sosial, masyarakat adil dan makmur.

Terkait dengan konsep wawasan kebangsaan tersebut di atas, kebangsaan atau nasionalisme juga merupakan suatu gerakan sosial, atau aliran rohaniah yang mempersatukan rakyat ke dalam "state" yang membangkitkan masa ke dalam keadaan politik dan sosial yang aktif. Dengan wawasan kebangsaan dapat di pandang sebagai landasan ideal dari setiap negara. Dengan semangat kebangsaan sebagai manifestasi kesadaran nasional yang mengadung cita-cita yang melahirkan ilham yang mendorong dan merangsang suatu bangsa. Seperti yang disebutkan Isjwara. F (1989:130) yang menyatakan empat macam cita-cita kebangsaan atau nasionalisme:

1. Perjuangan untuk mewujudkan persatuan nasional yang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, keagamaan, kebudayaan, dan persekutuan serta adanya solidaritas.
2. Perjuangan untuk mewujudkan kebebasan nasional yang meliputi kebebasan dari kekuatan-kekuatan intern yang tidak bersifat nasional atau yang hendak mengenyampingkan bangsa dan negara.
3. Perjuangan untuk mewujudkan kesendirian, pembedaan, individualitas, keaslian dan keistimewaan.
4. Perjuangan untuk mewujudkan pembedaan di antara bangsa-bangsa yang meliputi perjuangan untuk memperoleh kehormatan, kewibawaan, gengsi dan pengaruh.

Dari ke-empat macam cita-cita kebangsaan tersebut, jika dikaitkan dengan melihat hasil deskripsi penelitian ini, jelas bahwa penampilan jatidiri etnis Tionghoa Pontianak juga merasa sebagai warganegara yang merupakan kelompok manusia yang berkeinginan:

1. Etnis Tionghoa juga memiliki cita-cita bersama yang mengikat dirinya sebagai

warganegara menjadi satu kesatuan dengan negara Indonesia.

2. Etnis Tionghoa juga memiliki adat, budaya, dan kebiasaan yang sama sebagai akibat pengalaman sejarah untuk bisa hidup bersama.
3. Etnis Tionghoa juga memiliki sejarah hidup yang kelam di negara leluhur mereka sehingga tercipta rasa senasib dan kebersamaan.
4. Etnis Tionghoa juga menempati suatu wilayah tertentu yang merupakan kesatuan wilayah.
5. Etnis Tionghoa juga ingin terorganisir dalam suatu pemerintah yang berdaulat sehingga mereka terikat dalam suatu masyarakat hukum.

Dari penampilan di atas tersebut, mengenai pemahaman wawasan kebangsaan mereka bahwa diketahui komitmen kebangsaan adalah salah satu bentuk rasa cinta kepada tanah air yang kemudian melahirkan jiwa kebersamaan bagi pemiliknya, dengan satu tujuan yang sama, mereka membentuk cita-cita dalam membangun daerah dimana mereka dilahirkan dan dibesarkan.

Sebagaimana penampilan komitmen etnis Tionghoa tersebut tercermin dalam Pancasila sebagaimana sila ke tiga, yaitu persatuan sebagai dasar ideologi negara Pancasila sepatutnya menjadi acuan kerangka kita dalam membangun kehidupan berbangsa. Sebab, selain dipandang sebagai dasar ideologi negara Pancasila telah ditetapkan sebagai sumber hukum oleh MPR dan juga senantiasa dipandang sebagai paradigma budaya dalam melaksanakan semboyan negara “Bhinneka Tunggal Ika”. Bahwa yang disebut “*nation*” dalam konteks Nasionalisme Indonesia ialah suatu konsep yang dialamatkan pada suatu komunitas sebagai kesatuan kehidupan bersama, yang mencakup berbagai unsur yang berbeda-beda dalam aspek etnis, kelas atau golongan sosial, sistem kepercayaan kebudayaan bahkan bahasa dan sebagainya. Yang kesemuanya terintegrasi dalam perkembangan sejarah sebagai kesatuan sistem politik berdasarkan solidaritas yang ditopang

oleh kemauan politik bersama (Kartodirdjo, 1983).

Penampilan sikap kebangsaan etnis Tionghoa menunjukkan kedewasaan. Hal itu terungkap bahwa sejumlah sikap Tionghoa menampilkan, yakni perasaan cinta tanah air, perasaan bangga menjadi orang Indonesia, perasaan mendukung kebijakan pemerintah daerah Kalbar. Meskipun, sebagian kecil masih ada sikap etnis Tionghoa yang menunjukkan sikap negatif, yakni rasa kekecewaan terhadap kinerja pemerintah yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat banyak. Akan tetapi, sikap negatif tersebut tidak merubah komitmen kebangsaan mereka terhadap menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selanjutnya bagi etnis Tionghoa, pengetahuan mengenai wawasan kebangsaan mereka tercermin dalam perasaan mereka. Hal tersebut, ditampilkan melalui partisipasi aktif dalam sistem politik demokrasi yang berhubungan erat dengan kehidupan emosional seseorang menyangkut perasaan individu sebagai orang Tionghoa Indonesia terhadap objek sikap yang berkaitan dengan masalah emosi. Sikap adalah respon yang dikeluarkan seseorang terhadap apa yang terjadi dalam hal ini sikap etnis Tionghoa menyangkut wawasan kebangsaan melalui sikap mereka mengenai sistem politik demokrasi saat ini. Hal ini sesuai dengan Branson (1999:7) bahwa tujuan *civic education* secara epistemologi adalah merupakan partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan masyarakat baik tingkat lokal, negara bagian, maupun nasional.

Mengacu dari teori Branson bahwa, penampilan sikap kebangsaan yang ditunjukkan oleh etnis Tionghoa Pontianak merupakan bentuk dari komitmen kesadaran akan adanya sikap tanggung jawab, serta merasa memiliki cita-cita bersama untuk meningkatkan pembangunan di Kalimantan Barat sebagai tanah kelahiran sehingga mereka juga merasa terpenggil untuk ikut mendukung segala kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak.

Sedangkan untuk perilaku kebangsaan etnis Tionghoa menunjukkan perilaku yang baik dan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Bahwa perilaku mereka memiliki keberhasilan dalam mengembangkan perilaku integratif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang produktif demi mewujudkan kebaikan bersama sebagaimana yang dikehendaki dalam cita-cita bersama membangun daerah, bangsa dan negara.

Terkait akan hal tersebut, bahwa perilaku kebangsaan etnis Tionghoa yang ditunjukkan tersebut mencakup *intellectual skill* (keterampilan intelektual) dan *participation skills* (keterampilan partisipasi). Keterampilan intelektual sangat penting bagi terbentuknya warganegara yang memiliki wawasan luas, efektif dan bertanggungjawab, yakni antara lain kemampuan berfikir kritis. Meliputi, yakni warganegara yang dapat mengidentifikasi, menggambarkan, menjelaskan, menganalisis, mengevaluasi, menentukan dan mempertahankan pendapat yang berkenaan dengan masalah-masalah publik dan politik demokrasi. Pentingnya keterampilan partisipasi dalam demokrasi telah digambarkan oleh Aristoteles dalam bukunya *Politics* (340) Branson, dkk., (1999: 4). Aristoteles menyatakan, “Jika kebebasan dan kesamaan sebagaimana menurut sebagian pendapat orang dapat diperoleh terutama dalam demokrasi, maka kebebasan dan kesamaan itu akan dapat dicapai apabila semua orang tanpa kecuali ikut ambil bagian sepenuhnya dalam pemerintahan”. Jika diartikan, bahwa cita-cita demokrasi dapat diwujudkan dengan sesungguhnya bila setiap warganegara dapat berpartisipasi dalam pemerintahannya.

Dari perilaku kebangsaan inilah dapat dilihat bagaimana penampilan perilaku etnis Tionghoa beraktivitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara mereka, sebagai bentuk wujud dari penguatan komitmen kebangsaan etnis Tionghoa. Seperti yang dikemukakan oleh Sapriya (2001) bahwa tujuan Pendidikan Kewarganegaran adalah partisipasi yang penuh nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan politik dari warganegara yang taat kepada nilai-nilai dan

prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia. Partisipasi warganegara yang efektif dan penuh tanggungjawab memerlukan penguasaan seperangkat ilmu pengetahuan dan keterampilan intelektual serta keterampilan untuk berperan serta. Partisipasi yang efektif dan bertanggung jawab itu pun ditingkatkan lebih lanjut melalui pengembangan disposisi atau watak-watak tertentu yang meningkatkan kemampuan individu berperan serta dalam proses politik dan mendukung berfungsinya sistem politik yang sehat serta perbaikan masyarakat.

Sebagaimana dari data deskripsi dan hasil observasi dan wawancara mengenai perilaku kebangsaan etnis Tionghoa dapat terlihat dalam klasifikasi tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Klasifikasi Komitmen Kebangsaan Etnis Tionghoa Pontianak

Unsur Nasionalisme	Keadaan Perbedaan		
	Tinggi	Sedang	Rendah
Menjunjung Pancasila dan UUD 1945	✓		
Menguatkan Persatuan dan Kesatuan	✓		
Mendukung kebijakan pemerintah		✓	
Memelihara Kerukunan sesama warga	✓		
Mematuhi Hukum yang Berlaku	✓		
Mengembangkan Usaha Produktif	✓		
Mengembangkan Sikap Kesetiakawanan Sosial	✓		
Aktif dalam Pilkada dan Pemilu	✓		
Perasaan Bangga dan Cinta terhadap Tanah Air	✓		

Dari klasifikasi penampilan perilaku kebangsaan para etnis Tionghoa jelas bahwa penampilan komitmen etnis Tionghoa tersebut berkaitan dengan apa yang dikatakan Anderson (1996:6) dalam Wardaya (2002:16) yang memaknai *nation* (bangsa) sebagai “suatu komunitas politis yang dibayangkan

dan dibayangkan sekaligus sebagai suatu yang secara inheren terbatas dan berdaulat” (*an imagined political community and imagined as both inherently limited and sovereign*). Istilah dibayangkan (*imagined*) ini sangat penting menurut Anderson, mengingat anggota-anggota dari *nasion* itu kebanyakan belum pernah bertemu satu sama lain, tetapi pada waktu yang sama dibenak mereka hidup suatu bayangan bahwa mereka berada dalam suatu kesatuan komunitas tertentu. Karena hidup dalam bayangan (diartikan dalam arti positif) dikarenakan manusia yang juga hidup dan berdinamika, sehingga Nasionalisme di sini diartikan sebagai sesuatu yang hidup, yang terus secara dinamis mengalami proses pasang surut bahkan bisa naik dan turun. Pandangan ini dapat diartikan, mengumpamakan Nasionalisme merupakan sesuatu yang hidup, secara dinamis terus berkembang dan mencari bentuk-bentuk baru sesuai dengan perkembangan jaman.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik beberapa simpulan. *Pertama*, PKn di sekolah memberikan kontribusi bagi etnis Tionghoa, yakni berupa pengetahuan maupun membangun kesadaran mengenai pentingnya posisi mereka sebagai warganegara Indonesia yang harus selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bahwa PKn sebagai pengajaran mengenai pendidikan politik dan demokrasi yang harus dimiliki setiap warganegara yang baik yang akhirnya akan melahirkan komitmen kebangsaan terhadap tanah air Indonesia.

Kedua, pengalaman pengajaran PKn yang pernah diperoleh di sekolah terus dipelihara dan dikembangkan oleh etnis Tionghoa dalam kehidupan bermasyarakat, dengan mengembangkan nilai-nilai kejujuran dan kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya di lingkungan kerja, perdagangan maupun pergaulan dengan teman seperkumpulan.

Ketiga, komitmen kebangsaan etnis Tionghoa ditampilkan dengan memiliki wawasan kebangsaan yang baik, dengan memaknai sejarah perjuangan bangsa Indonesia dengan wujud semangat kebangsaan mereka menyadari bahwa dirinya merupakan bagian penting dari bangsa Indonesia yang tidak perpisahkan dari sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia.

Keempat, komitmen kebangsaan etnis Tionghoa ditampilkan dengan sikap kemandirian dan dewasa, dengan memiliki rasa cinta tanah air, rasa bangga menjadi orang Indonesia, menjaga kerukunan antar warga, dan memiliki cita-cita bersama membangun daerah Pontianak. Namun demikian, sikap kemandirian dan kedewasaan juga ditandai dengan komitmen ikut mendukung maupun menolak segala kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat dan mendukung kebijakan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat Pontianak.

Kelima, komitmen kebangsaan etnis Tionghoa ditampilkan dengan perilaku positif selalu berupaya menjalankan nilai-nilai ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan selalu memiliki etos kerja yang gigih, jujur, dan dapat dipercaya oleh orang lain, etnis Tionghoa berprinsip bahwa keberhasilan segala bidang usahanya adalah dengan memberikan pelayanan terbaik kepada setiap orang yang menjadi pelanggannya. Etnis Tionghoa menyadari bahwa komitmen perilaku mereka di perkuat dengan UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia maupun UU No.40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang telah membuka ruang bagi mereka dalam berbagai bidang ekonomi maupun politik tanpa lagi ada diskriminasi.

DAFTAR RUJUKAN

Anderson, B. (1991). *Imagined Community: Komunitas-Komunitas Terbayang*. Terjemahan oleh Omi Intan Naomi. 2002. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.

- Branson. (1999). *Making the Case for Civic Education: Where We Stand at the End of the 20th Century*. Washington: CCE.
- Bachrun, R. & Hartanto, B. (2000). *Krisis Identitas Diri Pada Kelompok Minoritas Cina*. Dalam Wibowo, I (editor). *Harga Yang harus Dibayar. Sketsa Pergulatan Etnis Cina di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama dan Pusat Studi Cina.
- Bagus, D. S. (1997). *Pendidikan Politik bagi Generasi Muda dalam Upaya Memantapkan Budaya Politik*. [di akses 14 Des 2012].
- Dugis, V. (2012). *Peranan Nasionalisme dan Apa Pentingnya*, disampaikan pada mata kuliah pengantar ilmu Hubungan Internasional. Departemen Hubungan Internasional. Universitas Airlangga, 22 Oktober 2012.
- Idris, M. (2009). *Pencitraan Bisnis Etnis Tionghoa Dalam Pariwara Surat Kabar*. Jurnal Wahana Didaktika Jurnal Ilmu Kependidikan. Nomor 16.
- Ismail, R. & Sagu. (2006). *Peta Penelitian Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam: Etos Kerja Orang Cina di Pontianak*. ISSUU. Jurnal Al-Albab 2008: P3M STAIN Pontianak.
- Kohn, H. (1965). *Nationalism: Its Meaning and History*, Princeton: D. Van Nostrand Company, 1965.
- Kartodirdjo, S. (2003). *Multidimensi Pembangunan Bangsa: Etos Nasionalisme dan Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Kanisius. *Sejarah Nasionalisme dan Perspektif Islam*, <http://robbani.wordpress.co./2007/08/01/4/>. [di akses 14 Des 2012].
- Lan, T, J. (1998). *Pengalaman Etnik Cina Dalam Pembentukan Identitas (Nasional) Indonesia*. Makalah. Simposium Etnis Cina Sebagai Minoritas di Indonesia. Depok, 26 Oktober 1998.
- Newman, B. M. & Philip, R. N. (1999). *Development Through Live. A Psychosocial Approach. Seventh Edition*. USA: An International Thomson Publishing Company.
- Pabali, H. M. (2003). *Sejarah Kesultanan Sambas Kalimantan*. STAIN Pontianak Press 2003.
- Patrick, J. J. & Thomas S. V. (2001). "Components of Education for Democratic Citizenship in the Preparation of Sosial Studies Teachers", dalam John J. Patrick dan Robert S. Leming (eds.), *Principles and Pratices of Democracy in the Education of Social Studie Teacher: Civic Learning in Teacher Education, Volume 1*, Bloomington, IN: ERIC Clearinghouse for Social Studies/Social Science Education, pp.39-33.
- Suryadinata, L.(1999). *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa*. Jakarta: LP3ES.
- Suryaditana, E. N. & Ananta, A. (2003). *Etnik Tionghoa, Pribumi Indonesia Dan Kemajemukan: Peran Negara, Sejarah, dan Budaya dalam Hubungan antar Etnis (Institute of Southeast Asian Studies)*.
- Susetyo, D. P. B. (2002). *Stereotip Dan Relasi Antar Etnis Cina Dan Etnis Jawa Pada Mahasiswa Di Semarang*. Tesis. Depok: Program Pascasarjana Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Suryaditana, L. (2005). *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia 1900-2002*. Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia.
- Somantri, N. (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: Rosda Karya.
- Tandililing, A. B. (1990). "Partisipasi Politik Keturunan Cina di Kalimantan Barat: Kasus Singkawang, Kabupaten Sambas." dalam Jurnal Ilmu Politik, No. 6, Universitas Tanjung Pura. Pontianak.
- Tjhin, C. S. (2007). *The Chinese Indonesians' Role in Substantiating Sino-Indonesia Strategis Partnership* dalam *The Indonesian Quanterly*. Jurnal CSIS Vol. 35 No. 4 Fourth Quarter 2007.

- Tylor, E. B. (1974). *Primitive Culture: researches into the development of mythodology, philosophy, religion, art, and custom*. New York: Gordon Press. First published n 1871.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. (2003) Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- Vasanty, P. (2004). Koentjaraningrat. ed. "*Kebudayaan Orang Tionghoa Di Indonesia*", *Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia*. Penerbit Djambatan. p. hal. 359.
- Wahab, A. A. (2001). "*Implementasi dan Arah Perkembangan PKn (Civic Education) di Indonesia*". *Acta Civicus*, Tahun 2001 Edisi 1. *Jurnal Ilmu Politik. Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Wardaya, B. (2002). "*Nasionalisme Universal: Menjawab Ajakan "Pasca-Nasionalis"nya Romo Mangun*", dalam *Jurnal Iman, Ilmu, Budaya*. vol. 3. Sept. 2002. Jakarta: Yayasan Bhumiksara.
- Yan, W. L. & Murray, P. (2002). *Nationalistic Education as the Focus for Civicand Citizenship Education: The Case of Hong Kong in Asia Pacific Education Review* 2002, Vol. 3, No. 2, 197-209.